

ANALISIS PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

Ni Putu Desi Budiastini¹

¹Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: desi.budiastini@gmail.com

Abstrak

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Singaraja dengan tujuan untuk mengidentifikasi keadaan sosial-ekonomi masyarakat, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kondisi permukiman dan mengkaji pengaruh mobilitas penduduk terhadap kondisi permukiman. Rancangan penelitian menggunakan rancangan deskriptif dengan metode studi kasus. Penentuan sampel menggunakan teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk kampung bugis bisa beradaptasi dengan baik di karna kemampuan mereka yang bisa berhubungn baik dengan masyarakat Bali tanpa terjadi konflik. Kelakuan masyarakat sendiri yang membuat lingkungan menjadi kumuh seperti, membuang sampah tidak pada tempatnya, membangun rumh terlalu dekat, drainase yang tidak bagus, dan prasarana yang kurang.

Kata kunci: Permukiman Kumuh, Sosial-ekonomi, Mobilitas Penduduk

Abstract

The study was conducted in the Singaraja City area with the aim of identifying the socio-economic conditions of the community, analyzing community perceptions of settlement conditions and assessing the effect of population mobility on settlement conditions. The study design uses a descriptive design with a case study method. Determination of the sample using snowball sampling technique. Data were collected by observation and in-depth interview techniques, and analyzed using descriptive analysis. The results showed that the Bugis villagers could adapt well because of their ability to connect well with the Balinese without conflict. The behavior of the community itself makes the environment dirty, such as disposing of rubbish out of place, constructing houses too close, poor drainage, and lack of infrastructure.

Keywords: Slums, Socio-economic, Population Mobility

PENDAHULUAN

Singaraja adalah ibukota Kabupaten Buleleng, Bali yang memiliki luas wilayah 27,98 km² dan dengan penduduk yang berjumlah 80.500 jiwa, kepadatan Kota Singaraja adalah 2.877 jiwa/km². Kota Singaraja menjadi ibukota

Kerajaan Buleleng yang pusat di Sukasada pada masalah kepemimpinan I Gusti Anglurah Panji ibukota kerajaan di pindah ke Singaraja karena dianggap berkedudukan lebih strategis. Namun, pada tahun 1986 Belanda mengambil alih kota Singaraja,

kemudian sempat dijadikan sebagai ibukota Kepulauan Sunda Kecil dan ibukota Bali sampai pada tahun 1956 (Wikipedia, 2015).

Jika dilihat dari bentang alamnya Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang mempunyai garis pantai terpanjang di Pulau Bali sehingga membuat Kabupaten Buleleng memiliki potensi sumberdaya pesisir yang melimpah. Potensi sumberdaya pesisir inilah menjadi daya tarik imigran luar Pulau Bali untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Buleleng, salah satu contohnya adalah Kota Singaraja ini yang mayoritas penduduk yang tinggal di pesisir adalah imigran dari luar Pulau Bali. Banyak imigran yang telah menetap lama, membangun permukiman di Kota Singaraja.

Kelurahan Kampung Bugis sudah ada sebelum Belanda menginjakkan kaki di Bali Utara. Pada sejarahnya Kelurahan Kampung Bugis banyak dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan erosi air laut yang sangat parah, sehingga menyebabkan hancurnya perkampungan orang-orang Bugis, namun tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun perkampungan ini kembali. Pada tahun 1946 Kelurahan Kampung Bugis mengalami kehancuran yang dikarenakan kedatangan pasukan Belanda. Orang-orang Kelurahan Kampung Bugis membantu Kerajaan Buleleng untuk melawan pasukan Belanda, sehingga Kelurahan Kampung Bugis di bakar oleh Belanda dan pada akhirnya Kelurahan Kampung Bugis dibangun kembali hingga sekarang.

Permukiman kumuh adalah keadaan lingkungan disekitar permukiman yang kualitasnya tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain: luas tanah yang terbatas

dengan kepadatan yang sangat tinggi serta bentuk fisik bangunan yang kurang layak, keadaan lingkungan yang tidak memadai dan dapat membahayakan penghuninya (Fitria & Setiawan, 2014). Kasus Kelurahan Kampung Bugis yang kurangnya perhatian dari pemerintah, menjadikan Kelurahan Kampung Bugis menjadi salah satu permukiman kumuh di Kota Singaraja. Hal inilah yang menyebabkan kami tertarik untuk menganalisis permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kampung Bugis.

METODE

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus.

Tahap pertama, dilakukan survei tempat kajian permukiman kumuh di Singaraja yang sekiranya memiliki sertifikat tanah yang sah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki warga yang ramah terhadap tamu yang datang agar pada saat kami melakukan observasi berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Setelah survei permukiman yang berada di Singaraja, akhirnya ditemukan permukiman yang tergolong kumuh dan warga yang ada didalamnya ramah terhadap tamu yang datang sehingga kami memilih Kelurahan Kampung Bugis sebagai lokasi kajian kami.

Tahap kedua, dilakukan observasi dengan mendatangi secara langsung rumah-rumah penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Bugis yang terkategori sebagai permukiman kumuh yang ada di Singaraja, dengan mengambil sampel 20 masyarakat secara acak. Cara mencari data menggunakan sistem wawancara terhadap

masyarakat Kelurahan Kampung Bugis dan mengamati kondisi rumah penduduk secara langsung menggunakan panduan berupa lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Sosial-ekonomi Masyarakat

Dari data yang didapatkan dilapangan atas hasil observasi sampel 20 masyarakat, dapat diambil kesimpulan bahwa taraf pendidikan masyarakat Kampung Bugis masih didominasi dengan pendidikan terakhir SD dan SMA. Mata pencaharian masyarakat rata-rata didominasi oleh berdagang. Dimana mereka membuka warung-warung kecil di depan rumah mereka untuk tempat mereka berjualan. Dari 20 sampel yang kami observasi, banyak juga masyarakat kampung Bugis tidak bekerja atau hanya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Pekerjaan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Bugis antara lain : Nelayan, Buruh Rongsokan, Pensiunan, dan Pegawai Swasta. Pendapatan masyarakat Kampung Bugis dari 20 sampel yang kami data 4 diantaranya memiliki pendapatan dibawah Rp.200.000,00. 8 penduduk memiliki pendapatan kisaran Rp.200.000,00-Rp.500.000,00, dan untuk penduduk yang berpendapatan diatas Rp.500.000,00 juga dihasilkan oleh 8 penduduk.

Rumah-rumah di Kampung Bugis sangat berdekatan satu dengan lainnya. Bahkan tidak jarang ditemukan rumah satu dan lainnya yang dindingnya menjadi satu. Ini juga merupakan salah satu faktor utama interaksi antar tetangga di Kampung Bugis cukup kental. Dari 20 responden yang kami ambil, 10

diantaranya memiliki dinding dengan kategori baik dan 10 rusak. Kerusakan dinding ini banyak disebabkan oleh usia bangunan yang sudah cukup lama dan tidak direnovasi. Kondisi lainnya yaitu atap dan lantai rata-rata rumah di Kampung Bugis beratapkan seng dan berlantai beton atau tanah. Mereka memilih alternatif ini karena lebih murah. Selain itu memilih atap seng juga mengurangi resiko cedera apabila angin laut sedang kencang, apalagi rumah mereka semua dekat dengan laut.

Penduduk Kampung Bugis rata-rata tidak memiliki halaman rumah, jadi dari jalan utama kita akan langsung menemui pintu masuk kerumah tanpa melalui gerbang atau halaman, sehingga saat menjemur pakaian pun tak jarang masyarakat justru menjemurnya di pinggir-pinggir jalan sehingga kadang menimbulkan kesan yang kurang enak dipandang bagi tamu atau orang yang baru pernah kesana. Kamar mandi pun dari 20 responden yang kami observasi, masih cukup banyak yang tidak memiliki kamar mandi. Sehingga mereka melakukan MCK di sungai yang tidak jauh dari permukiman Kampung Bugis, Sumber air yang biasa dimanfaatkan adalah sumur dan juga air dari PDAM langsung. Drainasenya pun tidak tersumbat namun sedikit bau. Aliran drainase ini langsung dialirkan ke arah laut. Dari observasi yang kami lakukan, masyarakat rata-rata membuang sampah ke laut sehingga membuat laut menjadi kotor.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Permukiman

Masyarakat Kampung Bugis merupakan penduduk yang sudah cukup lama menetap di wilayah tersebut. Banyak dari mereka justru merasa nyaman tinggal di Kampung

Bugis dan menetap disana. Dari observasi yang kami lakukan, dimana dalam pengambilan data ini kami mengambil 20 sampel masyarakat. Hanya 2 masyarakat yang menyatakan tidak nyaman tinggal disana, sedangkan 18 lainnya menyatakan nyaman.

Sebagian besar masyarakat berpresepsi bahwa Kampung Bugis nyaman bagi mereka. Bagi masyarakat kampung Bugis yang memiliki presepsi Kampung Bugis nyaman untuk mereka tinggal disana dikarenakan sudah lama menempati Kampung Bugis ini. Bahkan tidak jarang dari mereka sudah mendiami Kampung Bugis dari sejak lahir. Mereka menjadi lebih terbiasa atas seluruh keadaan lingkungan kampung Bugis, meskipun beberapa dari mereka memang merasa Kampung Mereka tidak tertata dengan baik namun karena sudah terbiasa mereka menjadi tidak risau untuk tinggal disini.

Dari 20 sampel, ada 2 sampel yang menyatakan tidak nyaman tinggal disini. Tidak jauh beda, alasan yang mereka paparkan pun hampir sama, dimana mereka agak kurang suka tinggal disana karena kondisi rumah yang terlalu berdekatan membuat keadaan menjadi agak panas, belum lagi jarak - jarak rumah ini sangat dekat dengan laut, mereka juga menjadi sering tidak nyaman karena ombak - ombak yang menerjang terutama ketika besar, akan dapat merusak rumah mereka. Meskipun tidak nyaman, mereka tetap tinggal karena faktor saudara.

3. Pengaruh Mobilitas Penduduk

Sebutan kampung istilah khas dari daerah Sulawesi Selatan, sejak lama yang merupakan tempat kesatuan hidup masyarakat. Sebuah kampung yang pada zaman dahulu

biasanya hanya ada beberapa keluarga yang mendiami sepuluh sampai dua ratus kepala rumah tangga yang dibangun di wilayah tepi sungai. Melihat Kampung Bugis di Kabupaten Buleleng erat kaitannya dengan kebudayaan Masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan, apabila mereka bermigrasi ke suatu tempat atau daerah maka mereka akan membentuk sebuah pemukiman. Begitu juga mengenai Masyarakat Suku Bugis yang bermigrasi ke Kabupaten Buleleng, setelah mereka bermigrasi ke Kabupaten Buleleng kemudian membentuk sebuah Pemukiman yang dinamakan sekarang dengan Kelurahan Kampung Bugis.

Mobilitas Suku Bugis ke Kabupten Buleleng memiliki keberhasilan membentuk pemukiman, disebabkan kemampuannya untuk memperoleh izin dari penguasa dan memiliki hubungan yang baik dengan Suku Bali tanpa menimbulkan kekerasan atau peperangan. Mulai awal datangnya Suku Bugia pada abad ke-17 di Kabupaten Buleleng, masyarakat Bugis sudah mulai mengambil peran dalam membantu Kerajaan Buleleng.

Kerajaan Buleleng dibawah pemerintahan I Gusti Panji Sakti, pada saat menyerang kerajaan Blambangan pada saat 31 Mei 1697. Masyarakat Bugis sebanyak 100 orang mengikuti I Gusti Panji Sakti berperang melawan Kerajaan Blambangan, dalam perkembangannya keberadaan Kampung Bugis banyak mengalami kejadian dan perubahan sebagai bagian dari tonggak awal mobilitas Suku Bugi ke Kabupaten Buleleng membentuk Pemukiman. Pada tahun 1846 pemukiman Suku Bugis di Kabupaten Buleleng mengalami kehancuran, karena dibakar oleh

pasukan Belanda, Peristiwa ini terjadi karena Suku Bugis membantu kerajaan Buleleng melawan Belanda, akan tetapi pemukiman suku bugis dapat dibangun kembali. Pemukiman Suku Bugis bertamabah kokoh dan berkembang terlebih lagi setelah Singaraja ditetapkan menjadi Ibu Kota Kerasidenan Bali dan Lombok pada tahun 1882, pemerintah belanda menetapkan Pelabuhan Pabean sebagai tempat Permukiman Suku Bugis dan juga pendatang lain. Menurut hasil observasi dilapangan pendatang di Kabupaten Buleleng yang menetap di Kelurahan Kampung Bugis sebagian besar berasal dari Pulau Madura dan Jawa. Mereka datang ke Pulau Bali untuk mencari pekerjaan, karena peluang pekerjaan dipualu Bali lebih banyak daripada di Madura dan jawa. Hal ini yang menyebabkan masyarakat bermigrasi ke Kabupaten Buleleng dan bermukim di Kelurahan Kampung Bugis, seiring perkembangan zaman perantau generasi pertama memiliki keluarga dan bermukim di Kampung Bugis.

Sampai saat ini Kelurahan Kampung bugis menjadi sebuah wilayah yang Multikultular (tidak hanya dihuni suku bugis), melainkan suku jawa, madura, dan bali. Karena jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah penduduk di pulau jawa dan madura yang semakin banyak, membuat masyarakat jawa dan madura datang ke Kelurahan Kampung Bugis untuk mencari pekerjaan terutama yang telah memiliki saudara di Kelurahan Kampung Bugis. Masyarakat Kampung Bugis yang bermukim di pesisir pantai, rata-rata bermatapencaharian sebagai penjual dan pembeli barang bekas. Sehingga menimbulkan kesan yang kumuh, karena kampung bugis yang

sempit ditambah dengan roda perekonomian yang berpusat pada barang bekas menimbulkan kesan yang kumuh. Hal ini ditambah dengan tidak ada layanan Tempat Pembuangan Sampah dari Pemerintah, mengakibatkan sampah langsung di buang langsung ke pantai.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan penduduk di Kelurahan Kampung Bugis didominasi oleh lulusan SD dan SMA, dengan pendapatan penduduk yang beragam, dari diatas Rp 200.000 sampai Rp 500.000. Keadaan rumah penduduk yang hampir tidak memiliki jarak dengan rumah penduduk lainnya, keadaan rumah penduduk setengah dari sample baik dan sisanya buruk yang secara fisik rusak akibat termakan usia. Rata penduduk kelurahan kampung bugis tidak memiliki kamar, untuk kebutuhan MCK hingga buang air penduduk masih memanfaatkan sungai dan laut namun ada juga di WC umum. Untuk sumber air penduduk memanfaatkan sumur bor dan air PDAM dengan drinase yang rata-rata menjadi satu yaitu got tertutup yang angung berakhir di laut begitu juga sampah yang juga dibuang di laut walaupun ada beberap yang membakarnya.

Penduduk yang tinggal di Kelurahan Kampung Bugis 18 dari 20 kk merasa nyaman tinggal disana, karn sudah tinggal sejak lama. Penduduk kampung bugis bisa beradaptasi dengan baik di karna kemampuan mereka yang bisa berhubungn baik dengan masyarakat Bali tanpa terjadi konflik. Kelurahan kampung bugis melewati banyak kejain buruk, namun masih kokoh bertahan hingga sekarang yang sudah berubah menjadi kampung multicultural atau dihuni

berbagai suku bangsa dan agama. Kelakuan masyarakat sendiri yang membuat lingkungan menjadi kumuh seperti, membuang sampah tidak pada tempatnya, membangun rumah terlalu dekat, drainase yang tidak bagus, dan prasarana yang kurang.

Undang-undang. Perumahan dan Permukiman (1992).

Undang-undang. Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. 1 (2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Dahlan, U. (2015). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. *Jurnal Fikratuna*, 8(2), 127–144.
- Fitria, N., & Setiawan, R. P. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 240–244.
- Hariyanto, A. (2012). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal PWK Unisba*, (4), 11–37.
- McAndrew, C. (1983). *Permukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK*, 4(2), 267–281.
- Romdiati, H., & Noveria, M. (2008). Mobilitas Penduduk Musiman di Kota Surabaya : Dampaknya Terhadap Lingkungan Permukiman Kumuh. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), 14.
- The World Bank, & UNCHS Habitat. (1999). *Cities Alliance for Cities Without Slums*, 23.